

PROVINSI

BANGKA BELITUNG

PEMERINTAH

PEMERINTAH

BANGKA BELITUNG

PEMERINTAH

PEMERINTAH

PROVINSI

BANGKA BELITUNG

PEMERINTAH

PROVINSI

BANGKA BELITUNG

PEMERINTAH

PROVINSI

BANGKA BELITUNG

PEMERINTAH

PROVINSI

BANGKA BELITUNG

PEMERINTAH

PROVINSI

BANGKA BELITUNG

PEMERINTAH

PROVINSI

BANGKA BELITUNG

PEMERINTAH

PROVINSI

BANGKA BELITUNG

PEMERINTAH

PROVINSI

BANGKA BELITUNG

PEMERINTAH

PROVINSI

BANGKA BELITUNG

PEMERINTAH

PROVINSI

BANGKA BELITUNG

PEMERINTAH

PROVINSI

BANGKA BELITUNG

PEMERINTAH

PROVINSI

BANGKA BELITUNG

PEMERINTAH

PROVINSI

BANGKA BELITUNG

PEMERINTAH

PROVINSI

BANGKA BELITUNG

PEMERINTAH

PROVINSI

BANGKA BELITUNG

PEMERINTAH

PROVINSI

BANGKA BELITUNG

PEMERINTAH

PROVINSI

BANGKA BELITUNG

PEMERINTAH

PROVINSI

BANGKA BELITUNG

PEMERINTAH

PROVINSI

BANGKA BELITUNG

PEMERINTAH

PROVINSI

BANGKA BELITUNG

PEMERINTAH

PROVINSI

BANGKA BELITUNG

PEMERINTAH

PROVINSI

BANGKA BELITUNG

PEMERINTAH

PROVINSI

BANGKA BELITUNG

PEMERINTAH

PROVINSI

BANGKA BELITUNG

PEMERINTAH

PROVINSI

BANGKA BELITUNG

PEMERINTAH

PROVINSI

BANGKA BELITUNG

PEMERINTAH

PROVINSI

BANGKA BELITUNG

PEMERINTAH

PROVINSI

BANGKA BELITUNG

PEMERINTAH

PROVINSI

BANGKA BELITUNG

PEMERINTAH

PROVINSI

BANGKA BELITUNG

PEMERINTAH

PROVINSI

BANGKA BELITUNG

PEMERINTAH

PROVINSI

BANGKA BELITUNG

PEMERINTAH

PROVINSI

BANGKA BELITUNG

PEMERINTAH

PROVINSI

BANGKA BELITUNG

PEMERINTAH

PROVINSI

BANGKA BELITUNG

PEMERINTAH

PROVINSI

BANGKA BELITUNG

PEMERINTAH

PROVINSI

BANGKA BELITUNG

PEMERINTAH

PROVINSI

BANGKA BELITUNG

PEMERINTAH

PROVINSI

BANGKA BELITUNG

PEMERINTAH

PROVINSI

BANGKA BELITUNG

PEMERINTAH

PROVINSI

BANGKA BELITUNG

PEMERINTAH

PROVINSI

BANGKA BELITUNG

PEMERINTAH

PROVINSI

BANGKA BELITUNG

PEMERINTAH

PROVINSI

BANGKA BELITUNG

PEMERINTAH

PROVINSI

BANGKA BELITUNG

PEMERINTAH

PROVINSI

BANGKA BELITUNG

PEMERINTAH

PROVINSI

BANGKA BELITUNG

PEMERINTAH

PROVINSI

BANGKA BELITUNG

PEMERINTAH

PROVINSI

BANGKA BELITUNG

PEMERINTAH

PROVINSI

BANGKA BELITUNG

PEMERINTAH

PROVINSI

BANGKA BELITUNG

PEMERINTAH

PROVINSI

BANGKA BELITUNG

PEMERINTAH

PROVINSI

BANGKA BELITUNG

PEMERINTAH

PROVINSI

BANGKA BELITUNG

PEMERINTAH

PROVINSI

BANGKA BELITUNG

PEMERINTAH

PROVINSI

BANGKA BELITUNG

PEMERINTAH

PROVINSI

BANGKA BELITUNG

PEMERINTAH

PROVINSI

BANGKA BELITUNG

PEMERINTAH

PROVINSI

BANGKA BELITUNG

PEMERINTAH

PROVINSI

BANGKA BELITUNG

PEMERINTAH

PROVINSI

BANGKA BELITUNG

PEMERINTAH

PROVINSI

BANGKA BELITUNG

PEMERINTAH

PROVINSI

BANGKA BELITUNG

PEMERINTAH

PROVINSI

BANGKA BELITUNG

PEMERINTAH

PROVINSI

BANGKA BELITUNG

PEMERINTAH

PROVINSI

BANGKA BELITUNG

PEMERINTAH

PROVINSI

BANGKA BELITUNG

PEMERINTAH

PROVINSI

BANGKA BELITUNG

PEMERINTAH

PROVINSI

BANGKA BELITUNG

PEMERINTAH

PROVINSI

BANGKA BELITUNG

PEMERINTAH

PROVINSI

BANGKA BELITUNG

PEMERINTAH

PROVINSI

BANGKA BELITUNG

PEMERINTAH

PROVINSI

BANGKA BELITUNG

PEMERINTAH

PROVINSI

BANGKA BELITUNG

PEMERINTAH

PROVINSI

BANGKA BELITUNG

PEMERINTAH

PROVINSI

BANGKA BELITUNG

PEMERINTAH

PROVINSI

BANGKA BELITUNG

PEMERINTAH

PROVINSI

BANGKA BELITUNG

PEMERINTAH

PROVINSI

BANGKA BELITUNG

PEMERINTAH

PROVINSI

BANGKA BELITUNG

PEMERINTAH

PROVINSI

BANGKA BELITUNG

PEMERINTAH

PROVINSI

BANGKA BELITUNG

PEMERINTAH

PROVINSI

BANGKA BELITUNG

PEMERINTAH

PROVINSI

BANGKA BELITUNG

PEMERINTAH

PROVINSI

BANGKA BELITUNG

PEMERINTAH

PROVINSI

BANGKA BELITUNG

PEMERINTAH

PROVINSI

BANGKA BELITUNG

PEMERINTAH

PROVINSI

BANGKA BELITUNG

PEMERINTAH

PROVINSI

BANGKA BELITUNG

PEMERINTAH

PROVINSI

BANGKA BELITUNG

PEMERINTAH

PROVINSI

BANGKA BELITUNG

PEMERINTAH

PROVINSI

BANGKA BELITUNG

PEMERINTAH

PROVINSI

BANGKA BELITUNG

PEMERINTAH

PROVINSI

BANGKA BELITUNG

PEMERINTAH

PROVINSI

BANGKA BELITUNG

PEMERINTAH

PROVINSI

BANGKA BELITUNG

PEMERINTAH

PROVINSI

BANGKA BELITUNG

PEMERINTAH

PROVINSI

BANGKA BELITUNG

PEMERINTAH

PROVINSI

BANGKA BELITUNG

PEMERINTAH

PROVINSI

BANGKA BELITUNG

PEMERINTAH

PROVINSI

BANGKA BELITUNG

PEMERINTAH

PROVINSI

BANGKA BELITUNG

PEMERINTAH

PROVINSI

BANGKA BELITUNG

PEMERINTAH

PROVINSI

BANGKA BELITUNG

PEMERINTAH

PROVINSI

BANGKA BELITUNG

PEMERINTAH

PROVINSI

BANGKA BELITUNG

PEMERINTAH

PROVINSI

BANGKA BELITUNG

PEMERINTAH

PROVINSI

BANGKA BELITUNG

PEMERINTAH

PROVINSI

BANGKA BELITUNG

PEMERINTAH

PROVINSI

BANGKA BELITUNG

PEMERINTAH

PROVINSI

BANGKA BELITUNG

PEMERINTAH

PROVINSI

BANGKA BELITUNG

PEMERINTAH

PROVINSI

BANGKA BELITUNG

PEMERINTAH

PROVINSI

BANGKA BELITUNG

PEMERINTAH

PROVINSI

BANGKA BELITUNG

PEMERINTAH

PROVINSI

BANGKA BELITUNG

PEMERINTAH

PROVINSI

BANGKA BELITUNG

PEMERINTAH

PROVINSI

BANGKA BELITUNG

PEMERINTAH

PROVINSI

BANGKA BELITUNG

PEMERINTAH

PROVINSI

BANGKA BELITUNG

PEMERINTAH

PROVINSI

BANGKA BELITUNG

PEMERINTAH

PROVINSI

BANGKA BELITUNG

PEMERINTAH

PROVINSI

BANGKA BELITUNG

PEMERINTAH

PROVINSI

BANGKA BELITUNG

PEMERINTAH

PROVINSI

BANGKA BELITUNG

PEMERINTAH

PROVINSI

BANGKA BELITUNG

PEMERINTAH

PROVINSI

BANGKA BELITUNG

PEMERINTAH

PROVINSI

BANGKA BELITUNG

PEMERINTAH

PROVINSI

BANGKA BELITUNG

PEMERINTAH

PROVINSI

BANGKA BELITUNG

PEMERINTAH

PROVINSI

BANGKA BELITUNG

PEMERINTAH

PROVINSI

BANGKA BELITUNG

PEMERINTAH

PROVINSI

BANGKA BELITUNG

PEMERINTAH

PROVINSI

BANGKA BELITUNG

PEMERINTAH

PROVINSI

BANGKA BELITUNG

PEMERINTAH

PROVINSI

BANGKA BELITUNG

PEMERINTAH

PROVINSI

BANGKA BELITUNG

PEMERINTAH

PROVINSI

BANGKA BELITUNG

PEMERINTAH

PROVINSI

BANGKA BELITUNG

PEMERINTAH

PROVINSI

BANGKA BELITUNG

PEMERINTAH

PROVINSI

BANGKA BELITUNG

PEMERINTAH

PROVINSI

BANGKA BELITUNG

PEMERINTAH

PROVINSI

BANGKA BELITUNG

PEMERINTAH

PROVINSI

BANGKA BELITUNG

PEMERINTAH

PROVINSI

BANGKA BELITUNG

PEMERINTAH

PROVINSI

BANGKA BELITUNG

PEMERINTAH

PROVINSI

BANGKA BELITUNG

PEMERINTAH

PROVINSI

BANGKA BELITUNG

PEMERINTAH

PROVINSI

BANGKA BELITUNG

PEMERINTAH

PROVINSI

BANGKA BELITUNG

PEMERINTAH

PROVINSI

BANGKA BELITUNG

PEMERINTAH

PROVINSI

BANGKA BELITUNG

PEMERINTAH

PROVINSI

BANGKA BELITUNG

PEMERINTAH

PROVINSI

BANGKA BELITUNG

PEMERINTAH

PROVINSI

BANGKA BELITUNG

PEMERINTAH

PROVINSI

BANGKA BELITUNG

PEMERINTAH

PROVINSI

BANGKA BELITUNG

PEMERINTAH

PROVINSI

BANGKA BELITUNG

PEMERINTAH

PROVINSI

BANGKA BELITUNG

PEMERINTAH

PROVINSI

BANGKA BELITUNG

PEMERINTAH

PROVINSI

BANGKA BELITUNG

PEMERINTAH

PROVINSI

BANGKA BELITUNG

PEMERINTAH

PROVINSI

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 15 . 01	Setoran Taspen	70.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 15 . 02	Setoran PT Jasa Raharja	1.009.800.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 15 . 04	Setoran KUPEM	200.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 4 . 2	DANA PERIMBANGAN	1.275.668.062.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	228.805.440.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 01	Bagi Hasil Pajak	55.616.230.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 01 . 01	Bagi Hasil Dari Pajak Bumi Dan Bangunan	21.853.007.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 01 . 06	Bagi Hasil Dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 Dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Neg	33.763.223.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA	173.189.210.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 02 . 02	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan - LRA	2.259.391.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 02 . 11	Bagi Hasil dari Minerba	170.929.819.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 2	Dana Alokasi Umum	1.046.862.622.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 2 . 01	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.046.862.622.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 2 . 01 . 01	Dana Alokasi Umum.	1.046.862.622.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 4 . 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	101.004.857.120,00	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 1	Pendapatan Hibah	101.004.857.120,00	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 1 . 01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LRA	101.004.857.120,00	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 1 . 01 . 01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah...	101.004.857.120,00	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	544.964.783.556,43	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	544.964.783.556,43	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00	<i>Non Kegiatan</i>	544.964.783.556,43	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 3	Belanja Subsidi	3.000.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 3 . 01	Belanja Subsidi kepada Perusahaan/Lembaga	3.000.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 3 . 01 . 03	Belanja Subsidi kepada Masyarakat	3.000.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4	Belanja Hibah	120.474.840.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4 . 01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	30.069.300.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4 . 01 . 02	Belanja Hibah kepada Lembaga Non Departemen	30.069.300.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4 . 05	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi	90.405.540.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4 . 05 . 01	Bantuan hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi	35.368.540.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4 . 05 . 36	Bantuan hibah kepada Lembaga Pendidikan	16.257.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4 . 05 . 37	Bantuan hibah kepada masyarakat dan ormas	38.780.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 5	Belanja Bantuan Sosial	750.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 5 . 03	Belanja Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat	750.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 5 . 03 . 01	Belanja Bantuan Sosial Kepada anggota masyarakat	750.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	350.006.099.384,43	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 6 . 02	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota	350.006.099.384,43	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 6 . 02 . 01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kota Pangkalpinang	65.889.842.305,00	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 6 . 02 . 02	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kabupaten Bangka	61.147.074.446,00	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 6 . 02 . 03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kabupaten Bangka Tengah	44.626.720.139,00	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 6 . 02 . 04	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kabupaten Bangka Barat	42.581.991.268,00	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 6 . 02 . 05	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kabupaten Bangka Selatan	40.758.007.803,00	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 6 . 02 . 06	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kabupaten Belitung	51.663.298.524,00	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 6 . 02 . 07	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kabupaten Belitung Timur	43.339.164.899,43	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	65.733.844.172,00	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 02	Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota	48.761.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 02 . 01	Belanja Bantuan Keuangan kepada Kota Pangkalpinang	3.730.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 02 . 02	Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Bangka	4.987.400.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 02 . 03	Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Belitung	3.539.200.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 02 . 04	Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Bangka Selatan	3.265.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 02 . 05	Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Bangka Tengah	3.340.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 02 . 06	Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Bangka Barat	24.355.200.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 02 . 07	Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Belitung Timur	5.544.200.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	15.924.800.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 01	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	15.924.800.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05	Belanja Bantuan kepada Partai Politik	1.048.044.172,00	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 01	Belanja Bantuan kepada partai politik.	1.048.044.172,00	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 8	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 8 . 01	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 8 . 01 . 01	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	898.341.175.094,02	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 6	PEMBIAYAAN DAERAH		
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 6 . 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	195.948.550.022,05	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 6 . 1 . 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	195.948.550.022,05	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 6 . 1 . 1 . 04	Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya	195.948.550.022,05	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 6 . 1 . 1 . 04 . 12	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	195.948.550.022,05	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 6 . 2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	10.000.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 6 . 2 . 2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	10.000.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 6 . 2 . 2 . 02	Badan Usaha milik Daerah BUMD	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 6 . 2 . 2 . 02 . 01	BUMD	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 6 . 2 . 2 . 05	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah.	10.000.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 6 . 2 . 2 . 05 . 01	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah.	10.000.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	185.948.550.022,05	
Pangkalpinang, 1 January 2020			
GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG			